

I Gede Agus Wibawa
I Wayan Sudemen
Dewa Ketut Suryawan
Ni Made Anggriyani

PENGANTAR
ILMU
SOSIAL

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR ILMU SOSIAL

Dr. I Gede Agus Wibawa, A.P., M.Si.

Drs. I Wayan Sudemen, M.Si.

Drs. Dewa Ketut Suryawan, M.Si.

Dra. Ni Made Anggriyani, M.Si.

Publica Indonesia Utama

2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 306 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7386-70-0

Cetakan Pertama, Desember 2025

Pengantar Ilmu Sosial

Penulis : Dr. I Gede Agus Wibawa, A.P., M.Si.
Drs. I Wayan Sudemen, M.Si.
Drs. Dewa Ketut Suryawan, M.Si.
Dra. Ni Made Anggriyani, M.Si.

Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati

Penata halaman : M. Qodir Ali Hamdani

Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

Bekerja sama dengan:

Lembaga Kajian Nasional (LKN)

Jalan Hasanudin 10 Dauhwaru, Jembrana – Bali 82217

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan *Buku Ajar Pengantar Ilmu Sosial* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan literatur akademis yang komprehensif bagi para mahasiswa, khususnya yang menempuh studi di bidang administrasi publik, serta bagi siapa pun yang tertarik untuk memahami kompleksitas masyarakat dan dinamika sosial yang melingkupinya.

Di era yang penuh dengan perubahan cepat dan tantangan yang makin kompleks, pemahaman yang mendalam tentang ilmu sosial bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental. Seorang calon administrator publik, sebagai calon pemimpin dan pengambil kebijakan, tidak dapat lagi hanya berbekal pengetahuan teknis-manajerial. Mereka harus dibekali dengan kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis struktur sosial, memahami akar masalah publik, dan merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan manusiawi. Buku ini dirancang untuk menjadi jembatan yang menghubungkan dunia teori ilmu sosial yang kaya dengan praktik administrasi publik yang dinamis.

Struktur buku ini dirancang secara sistematis, dimulai dari pengenalan hakikat dan teori-teori dasar ilmu sosial, bergerak menuju analisis isu-isu kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital, hingga pendalaman kritis terhadap budaya, kekuasaan, dan metodologi penelitian. Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran yang jelas, studi kasus yang relevan, serta soal evaluasi dan bahan diskusi untuk merangsang pemikiran analitis mahasiswa. Kami berupaya menyajikan materi dengan bahasa yang akademis namun tetap mudah dipahami, dengan harapan dapat menumbuhkan minat dan kecintaan pembaca terhadap ilmu sosial.

Penyusunan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh *civitas academica*, rekan-rekan sejawat, dan para ahli yang pemikirannya telah memperkaya isi buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Segala kritik dan saran yang membangun dari para pembaca akan kami terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat mencetak generasi administrator publik yang lebih cakap, kritis, dan berintegritas.

Selamat membaca dan selamat berpetualang dalam dunia ilmu sosial!

Hormat kami,

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Bab 1	
Hakikat dan Ruang Lingkup Ilmu Sosial	1
1.1 Hakikat Ilmu Sosial	2
1.2 Manusia dalam Ruang Lingkup Ilmu Sosial	5
1.3 Sejarah Perkembangan Ilmu Sosial	8
1.4 Hubungan Ilmu Sosial dengan Administrasi Publik.....	12
1.5 Relevansi Nilai Dasar Kampus dalam Ilmu Sosial.....	15
Bab 2	
Pendekatan dan Paradigma dalam Ilmu Sosial	23
2.1 Pendekatan Dasar dalam Ilmu Sosial.....	24
2.2 Paradigma dalam Ilmu Sosial	27
2.3 Konsep-Konsep Kunci Ilmu Sosial	30
2.4 Aplikasi Pendekatan dalam Analisis Isu Publik.....	33
2.5 Perbandingan Hasil Analisis Berdasarkan Berbagai Pendekatan	36
2.6 Kritik dan Perkembangan Paradigma Baru	36
Bab 3	
Teori-Teori Klasik Ilmu Sosial	45
3.1 Teori Fungsionalisme Struktural (Emile Durkheim).....	46
3.2 Teori Konflik (Karl Marx).....	49
3.3 Teori Aksi Sosial (Max Weber).....	52
3.4 Teori Interaksionisme Simbolik (George Herbert Mead)	55
3.5 Relevansi Teori Klasik dalam Administrasi Publik.....	58
Bab 4	
Sistem dan Struktur Sosial	67
4.1 Konsep Dasar Sistem Sosial	68
4.2 Konsep Dasar Struktur Sosial.....	71
4.3 Lembaga Sosial dan Perannya	74

4.4	Analisis Struktur Sosial dalam Pemerintahan Daerah	76
4.5	Dinamika Sistem dan Struktur Sosial	78

Bab 5

Kajian Akademik Ilmu-Ilmu Sosial Spesifik	87	
5.1	Sosiologi dan Antropologi	88
5.2	Ilmu Ekonomi dan Geografi	91
5.3	Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan	93
5.4	Ilmu Administrasi Publik/Negara dan Ilmu Hukum	95
5.5	Integrasi Ilmu Sosial dalam Analisis Lintas Disiplin	98

Bab 6

Perubahan Sosial Dan Modernisasi	107	
6.1	Konsep Dasar Perubahan Sosial	108
6.2	Teori-Teori Perubahan Sosial	111
6.3	Modernisasi dan Pembangunan	113
6.4	Globalisasi dan Transformasi Sosial	115
6.5	Perubahan Sosial dalam Konteks Administrasi Publik	117

Bab 7

Masalah Sosial Kontemporer	125	
7.1	Definisi dan Klasifikasi Masalah Sosial	126
7.2	Masalah Sosial Terkait Kemiskinan dan Ketidaksetaraan	128
7.3	Masalah Sosial Terkait Lingkungan dan Urbanisasi	130
7.4	Masalah Sosial Terkait Teknologi dan Digitalisasi	132
7.5	Peran Administrasi Publik dalam Penanganan Masalah Sosial	134

Bab 8

Masa Depan Manusia Dan Peradaban	143	
8.1	Evolusi Peradaban Manusia	144
8.2	Transformasi Menuju Era Digital	147
8.3	Dampak Teknologi pada Struktur Sosial	150
8.4	Tantangan dan Peluang Peradaban Masa Depan	153
8.5	Proyeksi Masa Depan Administrasi Publik	156

Bab 9

Pembangunan Berkelanjutan Dan Sdgs	163	
9.1	Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan	164
9.2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	167
9.3	Peran Ilmu Sosial dalam Implementasi SDGs	171

9.4	Tantangan dan Hambatan Implementasi SDGs di Indonesia	174
9.5	Strategi Administrasi Publik untuk Mencapai SDGs.....	176

Bab 10

Pendalaman Teori Sosial: Kritik dan <i>Post-Modernism</i>		185
10.1	Teori Kritis (<i>Frankfurt School</i>)	186
10.2	Teori <i>Post-Structuralism</i> dan <i>Post-Modernism</i>	189
10.3	Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice Theory</i>)	193
10.4	Teori Jaringan Sosial (<i>Social Network Theory</i>)	195
10.5	Relevansi Teori Kontemporer dalam Administrasi Publik	198

Bab 11

Kajian Mendalam: Budaya dan Organisasi		207
11.1	Konsep Dasar Budaya dalam ilmu sosial	208
11.2	Budaya Organisasi di Sektor Publik.....	211
11.3	Perubahan Budaya dan Inovasi Organisasi	214
11.4	Kajian Budaya dalam Administrasi Publik.....	217
11.5	Isu Multikulturalisme dan Kebijakan Publik	220

Bab 12

Kajian Mendalam: Kekuasaan, Kepemimpinan, dan Kebijakan		229
12.1	Konsep Kekuasaan dan Otoritas	230
12.2	Kepemimpinan dalam Konteks Publik	233
12.3	Proses dan Analisis Kebijakan Publik.....	236
12.4	Pemerintahan Daerah dan Otonomi.....	239
12.5	Governansi Digital dan <i>E-Government</i>	241

Bab 13

Metodologi Penelitian Sosial untuk Administrator		249
13.1	Peran Penelitian dalam Administrasi Publik	250
13.2	Metode Penelitian Kuantitatif dalam Administrasi Publik	253
13.3	Metode Penelitian Kualitatif dalam Administrasi Publik	255
13.4	Penelitian Tindakan (<i>Action Research</i>) dan <i>Participatory Research</i>	258
13.5	Penulisan Laporan dan Komunikasi Hasil Penelitian.....	260

Bab 14

Kajian Kritis dan Proyeksi Masa Depan Ilmu Sosial	269
14.1 Kritik terhadap Ilmu Sosial Klasik	270
14.2 Isu-Isu Lintas Batas (Transnasional)	273
14.3 Ilmu Sosial dan <i>Big Data</i>	275
14.4 Proyeksi Masa Depan Ilmu Sosial.....	278
14.5 Kontribusi Lulusan Administrasi Publik	280
Daftar Pustaka.....	287
Glosarium	291
Indeks	297
Tentang Penyusun/ Penulis.....	303

BAB 1

HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP ILMU SOSIAL

(Pertemuan 1–2)

Pencapaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan hal berikut.

1. Menjelaskan hakikat, karakteristik, dan nilai dasar dalam ilmu sosial.
2. Menganalisis posisi manusia sebagai makhluk sosial dan budaya dalam ruang lingkup ilmu sosial.
3. Mengidentifikasi akar historis dan tokoh-tokoh kunci dalam perkembangan ilmu sosial.
4. Menghubungkan relevansi ilmu sosial dengan bidang administrasi publik.
5. Menginternalisasi nilai-nilai dasar kampus sebagai landasan etika dalam kajian dan praktik ilmu sosial.

Pendahuluan

Ilmu sosial merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada studi sistematis mengenai masyarakat dan hubungan antarindividu di dalamnya. Kehadirannya menjadi krusial karena manusia, sebagai objek kajian utamanya, adalah makhluk yang kompleks dengan segala dinamika interaksi, budaya, dan struktur yang diciptakannya. Memahami ilmu sosial berarti membuka jendela untuk melihat bagaimana masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah seiring waktu. Disiplin ini menyediakan kerangka teoretis dan metodologis untuk menganalisis berbagai fenomena, mulai dari perilaku individu dalam kelompok kecil hingga proses global yang memengaruhi peradaban manusia secara keseluruhan.

Pentingnya mempelajari ilmu sosial terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan konflik. Dengan pemahaman ini, kita dapat merumuskan solusi yang lebih efektif dan manusiawi. Bagi mahasiswa administrasi publik, penguasaan ilmu sosial menjadi fondasi esensial. Kebijakan publik yang dirancang tanpa pemahaman konteks sosial, budaya, dan politik masyarakatnya sering kali gagal mencapai tujuan, bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, ilmu sosial bukan hanya sekumpulan teori, melainkan alat analisis kritis untuk membentuk administrator publik yang responsif dan berintegritas.

Bab ini akan menjadi gerbang awal dalam perjalanan memahami dunia sosial yang kompleks. Pembahasan akan dimulai dari hakikat ilmu sosial, yang membedakannya dari ilmu-ilmu lain, hingga menelusuri jejak sejarah perkembangannya. Selanjutnya, bab ini akan mengupas posisi sentral manusia sebagai makhluk sosial, peran individu dalam struktur kemasyarakatan, serta relevansi langsung ilmu sosial dalam konteks administrasi dan kebijakan publik. Pada akhirnya, pembahasan akan dihubungkan dengan pentingnya nilai-nilai etis sebagai kompas moral bagi para ilmuwan sosial dan praktisi di lapangan.

1.1 Hakikat Ilmu Sosial

Memahami hakikat ilmu sosial adalah langkah fundamental sebelum menjelajahi berbagai teori dan konsep di dalamnya. Subbab ini akan menguraikan esensi dari ilmu sosial, dimulai dari definisi dan karakteristik utamanya yang membedakannya sebagai sebuah disiplin ilmiah. Ilmu sosial tidak berdiri dalam ruang hampa, ia memiliki perbedaan mendasar dengan ilmu alam, terutama dalam hal objek kajian, metodologi, dan tingkat prediktabilitas. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kerancuan dalam menerapkan pendekatan ilmiah pada fenomena sosial yang dinamis dan penuh makna.

Selain aspek metodologis, ilmu sosial juga terikat erat dengan dimensi etika dan nilai. Karena objek kajiannya adalah manusia, setiap penelitian dan analisis harus dilandasi oleh prinsip-prinsip moral yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Subbab ini akan menyoroti pentingnya etika sebagai pilar utama yang memastikan bahwa pengetahuan sosial yang dihasilkan tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan bermanfaat bagi kemanusiaan.

1.1.1 Definisi dan Karakteristik Ilmu Sosial

Ilmu sosial (*social science*) secara umum didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, perilaku manusia, dan hubungan sosial secara sistematis (Ansar, dkk., 2023). Disiplin ini menggunakan metode ilmiah untuk menganalisis dan memahami pola-pola interaksi, struktur sosial, serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan korpus pengetahuan yang terorganisasi tentang fenomena sosial, yang dapat digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan bahkan memengaruhi dinamika kemasyarakatan (Irawan, dkk., 2021). Berbeda dengan pengetahuan umum yang bersifat intuitif, ilmu sosial berupaya menghasilkan temuan yang valid dan dapat diuji kembali melalui prosedur penelitian yang ketat.

Karakteristik utama ilmu sosial terletak pada objek kajiannya, yaitu manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Hal ini membuat ilmu sosial memiliki kompleksitas yang unik, karena perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti budaya, psikologi, ekonomi, dan sejarah. Dufty (dalam Irawan, dkk., 2021) mengemukakan beberapa ciri ilmu sosial, di antaranya adalah pengetahuan yang terorganisasi, dapat diteliti ulang, dan teorinya dibangun dari kajian ilmiah yang dapat digeneralisasikan. Karakteristik lainnya adalah sifatnya yang sering kali bersifat probabilistik, artinya kesimpulan yang dihasilkan lebih berupa kecenderungan atau kemungkinan, bukan hukum pasti seperti dalam ilmu alam.

Sebagai sebuah disiplin ilmiah, ilmu sosial mencakup berbagai bidang spesifik, seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekonomi, dan psikologi. Setiap bidang memiliki fokus kajiannya sendiri, namun saling terkait karena semuanya berusaha memahami aspek-aspek berbeda dari kehidupan manusia dalam masyarakat (Astawa, 2020). Sosiologi, misalnya, berfokus pada struktur dan interaksi sosial, sementara ilmu politik mengkaji kekuasaan dan proses pembuatan kebijakan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang

komprehensif tentang masalah sosial sering kali membutuhkan pendekatan interdisipliner.

1.1.2 Perbedaan Ilmu Sosial dengan Ilmu Alam

Perbedaan paling mendasar antara ilmu sosial dan ilmu alam terletak pada objek kajiannya. Ilmu alam (*natural science*) mempelajari fenomena fisik dan alamiah yang cenderung mengikuti hukum-hukum universal dan dapat diukur dengan presisi tinggi, seperti gerak planet atau reaksi kimia (Scribd, 2023). Sebaliknya, ilmu sosial mempelajari dunia manusia—masyarakat, budaya, dan interaksi—yang bersifat dinamis, kompleks, dan penuh makna subjektif. Gejala sosial tidak dapat diisolasi di laboratorium seperti gejala alam, karena perilaku manusia selalu terikat pada konteks sosial dan historisnya.

Metodologi yang digunakan juga menjadi pembeda yang signifikan. Meskipun ilmu sosial meminjam metode ilmiah dari ilmu alam, seperti observasi dan pengumpulan data, penerapannya harus disesuaikan. Dalam ilmu sosial, peneliti adalah bagian dari realitas yang ditelitinya, sehingga objektivitas penuh sulit dicapai dan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitiannya dapat memengaruhi hasil (Slideshare, 2023). Sementara ilmu alam mencari hukum-hukum (nomotetik) yang berlaku umum, ilmu sosial sering kali lebih fokus pada pemahaman mendalam (idiografik) terhadap kasus-kasus partikular.

Tingkat prediktabilitas dan generalisasi juga berbeda. Ilmu alam mampu menghasilkan prediksi yang sangat akurat berdasarkan hukum-hukum yang telah terbukti. Misalnya, seorang fisikawan dapat menghitung dengan tepat kapan gerhana matahari akan terjadi. Di sisi lain, ilmu sosial menghadapi tantangan dalam membuat prediksi yang pasti karena adanya kehendak bebas (*free will*) pada manusia dan kompleksitas faktor yang memengaruhi perilaku sosial (Scribd, 2023). Oleh karena itu, kesimpulan dalam ilmu sosial lebih sering berupa probabilitas atau kecenderungan, bukan kepastian absolut.

1.1.3 Etika dan Nilai Dasar dalam Kajian Ilmu Sosial

Etika penelitian merupakan fondasi krusial dalam ilmu sosial, karena objek kajiannya adalah manusia. Etika didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku peneliti untuk

memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak serta kesejahteraan partisipan (Adjar.id, 2023). Prinsip-prinsip ini mencakup kewajiban untuk mendapatkan persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*), menjaga kerahasiaan data responden, dan menghindari segala bentuk kerugian fisik maupun psikologis terhadap subjek penelitian (Deepublish Store, 2023).

Salah satu tujuan utama etika penelitian adalah untuk menyeimbangkan antara pencarian kebenaran ilmiah dengan perlindungan terhadap martabat manusia (Deepublish Store, 2023). Peneliti sosial memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menghasilkan pengetahuan yang valid, tetapi juga memastikan bahwa proses pencapaiannya tidak melanggar hak-hak asasi individu atau kelompok yang diteliti. Hal ini menjadi sangat penting ketika meneliti kelompok rentan, di mana peneliti harus menunjukkan sensitivitas budaya dan sosial yang tinggi agar tidak mengeksploitasi atau merugikan mereka (INCA University, 2025).

Nilai dasar dalam kajian ilmu sosial juga mencakup objektivitas dan kejujuran dalam pelaporan hasil. Peneliti harus melaporkan temuannya apa adanya, tanpa memanipulasi data untuk mendukung hipotesis atau agenda tertentu. Plagiarisme dan fabrikasi data adalah pelanggaran etika yang serius karena merusak integritas ilmiah dan kepercayaan publik terhadap sains (Slideshare, 2023). Pada akhirnya, penerapan etika dan nilai-nilai dasar ini tidak hanya melindungi subjek penelitian, tetapi juga menjaga kredibilitas dan kebermanfaatannya ilmu sosial bagi masyarakat luas.

1.2 Manusia dalam Ruang Lingkup Ilmu Sosial

Manusia adalah pusat dari seluruh kajian ilmu sosial. Keberadaannya tidak dapat dipahami hanya sebagai individu biologis, tetapi harus dilihat dalam konteks hubungannya dengan orang lain dan lingkungan budayanya. Subbab ini akan mengelaborasi konsep manusia sebagai makhluk sosial dan budaya, sebuah dualitas yang membentuk identitas dan perilakunya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan inheren untuk berinteraksi, yang kemudian melahirkan fenomena-fenomena sosial yang lebih besar, seperti kelompok dan masyarakat.

Proses interaksi sosial ini bukanlah sesuatu yang acak, melainkan mengikuti pola-pola tertentu yang pada akhirnya membentuk struktur sosial. Dalam struktur tersebut, setiap individu menempati posisi atau status tertentu dan menjalankan peran yang diharapkan oleh masyarakat. Subbab ini akan membahas bagaimana interaksi sosial menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat, serta bagaimana individu, meskipun sering kali terlihat dipengaruhi oleh struktur, juga memiliki kapasitas untuk bertindak dan memengaruhi kembali struktur sosial itu sendiri.

1.2.1 Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Budaya

Konsep manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang pertama kali digagas oleh Aristoteles, menegaskan bahwa manusia secara kodrati hidup berkelompok dan tidak dapat mencapai potensi penuhnya dalam isolasi (Universitas Wira Buana, 2022). Ketergantungan pada orang lain untuk bertahan hidup, berkembang, dan mendapatkan makna hidup adalah ciri fundamental kemanusiaan. Kebutuhan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan membentuk ikatan emosional mendorong manusia untuk selalu menjadi bagian dari suatu komunitas atau masyarakat (Astawa, 2020).

Di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk budaya (*homo culturalis*). Budaya, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat, menjadi kerangka acuan bagi perilakunya. Budaya diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar sosial atau enkulturasi, dan inilah yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya (Irawan, dkk., 2021). Dengan demikian, tindakan seorang individu tidak hanya didorong oleh naluri biologis, tetapi juga dibentuk dan dibatasi oleh nilai dan norma budaya tempat ia dibesarkan.

Dualitas sebagai makhluk sosial dan budaya ini saling terkait erat. Interaksi sosial adalah medium utama bagi transmisi dan penciptaan budaya. Sebaliknya, budaya menyediakan “aturan main” atau pedoman bagi berlangsungnya interaksi sosial agar berjalan teratur. Tanpa interaksi, budaya tidak akan ada, dan tanpa budaya, interaksi manusia akan menjadi kacau dan tidak bermakna. Oleh karena itu, memahami manusia dalam ilmu sosial berarti memahami

dialektika konstan antara dorongan untuk bersosialisasi dan kerangka budaya yang membingkainya.

1.2.2 Interaksi Sosial dan Pembentukan Masyarakat

Interaksi sosial adalah proses fundamental di mana individu-individu saling berhubungan, berkomunikasi, dan memengaruhi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ansar, dkk., 2023). Proses ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya kehidupan sosial; tanpa interaksi, tidak akan ada kelompok atau masyarakat. Menurut Gillin dan Gillin, proses sosial pada dasarnya adalah cara-cara berhubungan yang terlihat ketika individu dan kelompok bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan di antara mereka (Repository Unikom, n.d.). Interaksi ini dapat bersifat asosiatif (seperti kerja sama dan akomodasi) atau disosiatif (seperti persaingan dan konflik).

Masyarakat terbentuk sebagai hasil dari jalinan interaksi sosial yang berulang dan terpola dari waktu ke waktu. Ketika interaksi menjadi stabil dan berkelanjutan, ia akan menghasilkan struktur sosial, yaitu pola hubungan yang relatif permanen antarindividu dan kelompok (Ansar, dkk., 2023). Struktur ini kemudian dilembagakan melalui norma, nilai, dan institusi sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bukanlah sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah sistem terorganisasi yang lahir dari dan dipelihara melalui interaksi sosial yang terus-menerus.

Komunikasi memegang peranan kunci sebagai dasar dari semua interaksi sosial. Melalui komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, individu dapat berbagi makna, menafsirkan niat orang lain, dan mengoordinasikan tindakan mereka (Repository Unikom, n.d.). Perkembangan teknologi komunikasi modern, seperti media sosial, telah memperluas skala dan kecepatan interaksi, memungkinkan terbentuknya komunitas virtual yang melintasi batas-batas geografis. Namun, esensinya tetap sama: interaksi adalah “perekat” yang menyatukan individu-individu menjadi sebuah entitas kolektif yang kita sebut masyarakat.

1.2.3 Peran Individu dalam Struktur Sosial

Dalam sosiologi, hubungan antara individu (agen) dan struktur sosial adalah salah satu perdebatan teoretis yang paling sentral.

Struktur sosial, yang terdiri dari pola-pola hubungan, institusi, dan norma, sering kali dilihat sebagai kekuatan eksternal yang membatasi dan membentuk tindakan individu. Namun, pandangan ini dikritik karena dianggap terlalu deterministik dan mengabaikan kapasitas individu untuk bertindak secara sadar dan kreatif (Demartoto, 2013). Individu bukanlah robot yang pasif, melainkan aktor yang aktif menafsirkan dan merespons lingkungan sosialnya.

Teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens menawarkan jalan tengah dengan konsep “dualitas struktur”. Menurut Giddens, struktur dan agensi (individu) adalah dua sisi dari mata uang yang sama; mereka tidak dapat dipisahkan. Struktur sosial menjadi medium sekaligus hasil dari tindakan individu (Giddens, 1997, dalam Kumparan.com, 2024). Artinya, individu menggunakan aturan dan sumber daya yang disediakan oleh struktur untuk bertindak, dan melalui tindakan-tindakan itulah mereka secara terus-menerus mereproduksi atau bahkan mengubah struktur itu sendiri.

Sebagai contoh, seorang individu yang bekerja dalam sebuah birokrasi mengikuti aturan dan prosedur yang ada (struktur), namun tindakannya sehari-hari juga turut melanggengkan keberadaan birokrasi tersebut. Pada saat yang sama, individu memiliki kemampuan refleksif untuk memikirkan dan memodifikasi tindakannya, yang berpotensi mengubah norma atau praktik yang ada dalam organisasi (Gunung Djati Conference Series, 2023). Dengan demikian, peran individu dalam struktur sosial bersifat dinamis; ia dibentuk oleh struktur, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk kembali struktur tersebut melalui praktik sosial sehari-hari.

1.3 Sejarah Perkembangan Ilmu Sosial

Setiap disiplin ilmu memiliki akar sejarah yang membentuk arah dan fokusnya, tidak terkecuali ilmu sosial. Subbab ini akan membawa kita menelusuri jejak perkembangan pemikiran tentang masyarakat, dimulai dari fondasi filosofis yang diletakkan pada Abad Pencerahan. Periode ini menandai pergeseran penting dari penjelasan teologis menuju analisis rasional dan empiris terhadap fenomena sosial, yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu sosial sebagai sebuah sains.

Perkembangan selanjutnya ditandai oleh kemunculan tokoh-tokoh pendiri yang memberikan kontribusi monumental dalam

melembagakan ilmu sosial sebagai disiplin akademis. Pemikiran dari Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx akan diulas sebagai pilar-pilar utama yang membangun teori-teori klasik sosiologi. Terakhir, subbab ini akan melihat bagaimana ilmu sosial terus berevolusi hingga era kontemporer, merespons tantangan-tantangan baru seperti globalisasi dan digitalisasi, serta menunjukkan relevansinya yang tak lekang oleh waktu.

1.3.1 Akar Filosofis Ilmu Sosial (Abad Pencerahan)

Akar intelektual ilmu sosial dapat dilacak kembali ke Abad Pencerahan (sekitar abad ke-17 dan ke-18) di Eropa. Periode ini ditandai oleh penekanan pada akal (rasio), empirisme, dan semangat untuk mempertanyakan otoritas tradisional, termasuk dogma agama (Purana School, 2017). Para filsuf Abad Pencerahan seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau mulai menerapkan metode analisis kritis yang sebelumnya digunakan dalam ilmu alam untuk memahami masyarakat, pemerintahan, dan hakikat manusia. Mereka percaya bahwa masyarakat, seperti halnya alam, diatur oleh hukum-hukum tertentu yang dapat ditemukan melalui observasi dan penalaran.

Revolusi Industri dan Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 menjadi katalisator utama yang mendorong kebutuhan akan sebuah “ilmu tentang masyarakat”. Perubahan sosial yang drastis, seperti urbanisasi massal, munculnya kelas pekerja industrial, dan runtuhnya tatanan feodal, menciptakan berbagai masalah sosial baru yang tidak dapat lagi dijelaskan oleh kerangka pemikiran lama (Universitas Wira Buana, 2025). Kondisi inilah yang mendorong para pemikir untuk secara sistematis menganalisis sumber, sifat, dan konsekuensi dari perubahan-perubahan besar tersebut, yang pada akhirnya melahirkan sosiologi sebagai disiplin yang terpisah dari filsafat.

Meskipun pemikiran tentang masyarakat sudah ada sejak zaman filsuf kuno seperti Plato dan Aristoteles, Abad Pencerahan memberikan fondasi metodologis yang krusial. Gagasan bahwa masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah dan objektif, terlepas dari spekulasi metafisika, merupakan warisan terpenting dari periode ini. Semangat *sapere aude* atau “berani berpikir sendiri” yang diserukan oleh Immanuel Kant menjadi motor penggerak bagi para pemikir

untuk mengembangkan analisis sosial yang independen dan kritis, yang menjadi ciri khas ilmu sosial modern.

1.3.2 Tokoh-Tokoh Pendiri Ilmu Sosial (Comte, Durkheim, Weber, Marx)

Auguste Comte (1798–1857), seorang filsuf Prancis, sering disebut sebagai “Bapak Sosiologi” karena dialah yang pertama kali menciptakan istilah “sosiologi” (awalnya disebut “fisika sosial”). Comte mengusulkan pendekatan positivisme, yang berpendapat bahwa masyarakat harus dipelajari dengan menggunakan metode ilmiah yang ketat seperti dalam ilmu alam, yaitu melalui observasi, eksperimen, dan komparasi. Ia juga terkenal dengan “hukum tiga tahap”, yang menyatakan bahwa pemikiran manusia dan masyarakat berevolusi dari tahap teologis, ke metafisika, dan akhirnya ke tahap positif atau ilmiah.

Émile Durkheim (1858–1917) berjasa besar dalam melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis yang diakui. Kontribusi utamanya adalah konsep “fakta sosial”, yaitu cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu dan memiliki kekuatan memaksa (Durkheim, dalam Gramedia, 2023). Menurutnya, sosiologi harus fokus pada studi fakta sosial ini secara objektif. Karyanya tentang bunuh diri (*suicide*) menjadi contoh klasik bagaimana fenomena yang tampaknya sangat individual dapat dijelaskan melalui faktor-faktor sosial seperti tingkat integrasi dan regulasi sosial.

Karl Marx (1818–1883), meskipun lebih dikenal sebagai ekonom dan filsuf politik, memberikan kontribusi fundamental bagi ilmu sosial melalui teori konflik. Marx berpendapat bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas antara kaum borjuis (pemilik alat produksi) dan proletar (kaum pekerja). Analisisnya tentang kapitalisme, alienasi, dan perubahan sosial yang didorong oleh konflik material menjadi dasar bagi pendekatan konflik dalam sosiologi, yang menawarkan perspektif kritis terhadap ketidaksetaraan dan struktur kekuasaan dalam masyarakat.

Max Weber (1864–1920) memberikan perspektif yang berbeda dengan menekankan pentingnya pemahaman interpretatif (*verstehen*) terhadap makna subjektif di balik tindakan sosial. Berbeda